

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki posisi yang sangat sentral bagi keberlangsungan suatu negara karena pendidikan bukan sekadar proses memperoleh ilmu atau alat mencetak ijazah, melainkan juga sarana untuk memanusiakan manusia dan membebaskan mereka dari kebudayaan bisu.¹ Melalui pendidikan, orang dapat membangun kesadaran kritis, melawan penjajah, menabrak sistem yang menindas, dan menyejahterakan masyarakatnya. Namun, dalam konteks pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia belum sampai memanusiakan manusia. Hal ini tercermin dalam ruang dialog dan berpikir kritis yang masih dipersempit, proses pembelajaran yang cenderung konvensional, serta berorientasi pada kebutuhan industri.²

Dalam kenyataannya, problem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan kurikulum yang cenderung bersifat administratif, padat materi, dan berorientasi pada capaian kuantitatif semata.³ Kurikulum sering kali menempatkan peserta didik sebagai objek penerima pengetahuan, bukan sebagai subjek yang aktif, reflektif, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kurikulum sebagai inti atau pedoman dari sistem pendidikan belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai kompas yang mengarahkan dan menuntun proses pembelajaran yang menyenangkan dan membebaskan bagi pendidik dan peserta didik.

Di samping itu, dinamika perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia selalu menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Fenomena yang menarik ialah kurikulum sebagai kunci utama pendidikan nasional tidak pernah bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perubahan, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Perubahan ini sering kali

¹Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3S, 1972), hlm. 52.

² H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 115-120

³H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 87.

menimbulkan problematika, seperti ketidaksiapan pendidik dan peserta didik, keterbatasan sarana-prasarana, serta kecenderungan pendekatan pembelajaran yang bersifat administratif dan teknokratis.⁴ Sementara itu, Wulan Widaningsih dalam kajiannya mengatakan bahwa permasalahan pokok yang membelenggu sistem pendidikan Indonesia dewasa ini ialah kuatnya cengkeraman sistem birokratis dan teknokratis dalam tata kelola sekolah. Kondisi tersebut mengakibatkan terasingnya guru dari peran sejatinya, minimnya partisipasi dalam kelas, ketimpangan dalam akses digital, serta terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia berorientasi pada pembebasan dan pengembangan potensi peserta didik sebagai subjek pendidikan.

Kemudian, dinamika perubahan kurikulum sering kali berubah wajah seiring pergantian kepemimpinan politik dan umur kabinet. Kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami sebelas kali perubahan yang signifikan. Perjalanan dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka mencerminkan adanya pola kontinuitas sekaligus diskontinuitas dalam sistem pendidikan Indonesia. Lebih lanjut, perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan upaya menjawab perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Namun, dalam perjalanan waktu tidak ada fondasi berpikir yang dipandang berkualitas dalam mengkonstruksi piramida kurikulum yang kokoh. Ada kepentingan tertentu, baik kepentingan negara, pasar, maupun kelompok sosial dominan.⁶

Selain itu, perubahan kurikulum memberi dampak kepada rendahnya kualitas pendidik. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pendidik untuk menerima kurikulum baru.⁷ Perubahan kurikulum yang selalu bergantian tidak diimbangi dengan pelatihan yang mendalam dan berkelanjutan. Guru cenderung mengikuti instruksi kurikulum secara mekanis tanpa ruang kritis. Guru dituntut

⁴H.A.R. Tilaar, *Kurikulum dan Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 78.

⁵Wulan Widaningsih, "Paradigma Humanisme Paulo Freire Dalam Transformasi Manajemen Pendidikan Abad 21: Analisis Kritis Praktik Manajemen Pendidikan Saat Ini", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10:4 (Desember 2025): 377.

⁶Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 21–23.

⁷Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 45–48.

menyesuaikan modul dan administrasi sesuai kebijakan terbaru, sementara ruang refleksi kritis terhadap tujuan pendidikan kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini memengaruhi orientasi guru dari praksis pedagogis yang reflektif ke pemenuhan dokumen formal.⁸ Akibatnya, guru cenderung menggunakan pendekatan gaya bank⁹ dan memahami kurikulum secara teknis atau sebatas penyusunan administratif tanpa menginternalisasi landasan filosofis, tujuan kritis, dan pendekatan pedagogis yang disusun.¹⁰

Di samping itu, perubahan kurikulum juga memberi dampak kepada rendahnya kualitas peserta didik. Ketiadaan pendampingan yang memadai dalam perubahan kurikulum pada akhirnya menggerus motivasi belajar sekaligus membelenggu potensi peserta didik untuk berkembang secara optimal.¹¹ Kebijakan perubahan kurikulum cenderung menempatkan peserta didik sebagai objek yang pasif atau eksperimen percobaan. Selanjutnya, banyak peserta didik di berbagai daerah zonasi 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang masih beradaptasi dengan kurikulum lama harus menyesuaikan lagi dengan kurikulum baru.¹² Pola ini berpotensi menciptakan jarak antara kebijakan pendidikan dan realitas konkret masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perubahan kurikulum yang cenderung *top-down* dan berdampak signifikan terhadap kualitas peserta didik.¹³

Kemudian, pengimplementasian kurikulum dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih cenderung bersifat sentralistik dan hierarkis.¹⁴ Hal ini menimbulkan keterasingan (alienasi) antara kebijakan pendidikan dan realitas praktis di lapangan. Artinya, kurikulum yang ditentukan oleh pusat memiliki keterbatasan ketika diterapkan di wilayah Indonesia yang sangat luas dan

⁸Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 74–77.

⁹Guru sebagai depositor tunggal pengetahuan dan peserta didik sebagai wadah kosong yang menanti untuk diisi sesungguhnya bukan sekadar keliru secara pedagogis, melainkan sebuah penindasan yang secara sistemis mematikan kesadaran manusia. Bdk. Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, penerj. Yuhda Wahyu Pradana (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2019), hlm. 56.

¹⁰H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, op. cit., hlm. 101–104.

¹¹Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 56–58.

¹²Kemendikbud RI, *Peta Pendidikan Daerah 3T* (Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, 2020).

¹³Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 81–84.

¹⁴Dalam tata kelola kurikulum sentralistik, seluruh perangkat mulai dari landasan, struktur, mata pelajaran, siliabus, kegiatan pembelajaran, buku, media, alat-alat penunjang, serta pedoman pelaksanaannya disusun oleh pusat. Bdk. Teguh Triwiyanto, *Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2021), hlm. 42.

beragam.¹⁵ Perbedaan kondisi geografis, kebutuhan peserta didik, serta tingkat kemajuan daerah mengakibatkan kurikulum nasional tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi keragaman lokal. Selain itu, kurikulum yang dirancang dan dikendalikan dari pusat, implementasinya membutuhkan waktu lama karena perbedaan pemahaman dan kesiapan pelaksana pendidikan.¹⁶ Kondisi tersebut berkontribusi pada krisis tata kelola pendidikan. Kurikulum tidak menjadi alat pembebasan, melainkan justru berpotensi menjadi alat dominasi struktural.¹⁷

Perubahan kurikulum juga menurut Michael W. Apple tidak terlepas dari campur tangan globalisasi dan kapitalisme global.¹⁸ Pendidikan dijadikan investasi sumber daya manusia yang harus menyuplai tenaga kerja kompetitif. Orientasi ini memengaruhi desain kurikulum yang menekankan literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap pasar kerja. Sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, kebijakan pendidikan menunjukkan kecenderungan mengintegrasikan prinsip *market-oriented education*, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja dan industri. Selain itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas cenderung ditentukan oleh kemampuan ekonomi.¹⁹

Dengan demikian, untuk mengatasi persoalan dinamika kurikulum yang konvensional, politis, kapitalis, dan hierarkis dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, penulis menggunakan pemikiran Paulo Reglus Neves Freire, seorang Filsuf Pendidikan abad ke-20. Paulo Freire menggagas karya filosofisnya dengan judul *Education as the Practice of Freedom* (Pendidikan sebagai Praktik Kebebasan) yang menegaskan pendidikan sebagai alat pembebasan dari sistem yang menindas.²⁰ Merujuk pada pemikiran Paulo Freire yang dikutip oleh William A. Smith, pendidikan pembebasan dipandang sebagai sebuah pisau analisis guna untuk menelaah sumber-sumber kemelaratan dan memudarnya otonomi masyarakat akibat ketimpangan struktural yang mengakar

¹⁵Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum*, op. cit., hlm. 19-22.

¹⁶Suyanto dan Asep Jihad, op. cit., hlm. 40-43.

¹⁷Paulo Freire, *Education as the Practice of Freedom*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 27.

¹⁸Michael W. Apple, *Educating the "Right" Way: Markets, Standards, God, and Inequality* (New York: Routledge, 2006), hlm. 3.

¹⁹Henry A. Giroux, *Neoliberalism's War on Higher Education* (Chicago: Haymarket Books, 2014), hlm. 9.

²⁰Mi'raj Dodi Kurniawan, *Pembaruan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire* (Malang: Intrans Publishing, 2021), hlm. 9.

dalam dimensi ekonomi, politik, dan kultural. Lebih jauh, Freire juga gigih menentang hegemoni sistem pendidikan formal serta memperjuangkan kebebasan individu sebagai fondasi utama dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.²¹

Gagasan Paulo Freire dibangun berdasarkan realitas yang terjadi di kampung halamannya. Paulo Freire berusaha melawan cangkang sistem pendidikan dehumanisasi pemerintah Brasil yang sama sekali tidak berpihak pada masyarakat miskin.²² Selanjutnya, Freire mengkritik konsep yang dijuluki sebagai "kebudayaan bisu", yakni suatu kondisi budaya yang membungkam nalar kritis masyarakat dan menggiring mereka untuk patuh kepada penguasa. Sejalan dengan itu, Freire juga mengkritik keras model pendidikan gaya bank yang menciptakan hubungan timpang antara guru dan murid. Akibatnya, mereka hanya difungsikan sebagai penerima informasi yang pasif dan menjadi korban sistem pendidikan yang menuntut kepatuhan tanpa ruang bernalar secara bebas.²³

Hakikat pendidikan yang benar menurut kaca mata Paulo Freire adalah melepaskan manusia dari segala rantai perbudakan, cengkeraman, dan pemerasan.²⁴ Senada dengan hal tersebut, Immanuel Kant maupun John Dewey sebagaimana diungkapkan Rijal Abdillah pun sependapat bahwa hakikat pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses humanisasi yang utuh dan menyeluruh. Sebab hanya melalui pendidikan yang membebaskan, cita-cita luhur bangsa untuk mencerdaskan kehidupan manusia secara menyeluruh dan utuh dapat benar-benar terwujud.²⁵

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan. Faktanya, Brasil dan Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah bangsa asing dan tergolong negara berkembang. Brasil dan Indonesia juga sama-sama memusuhi penindasan dan memperjuangkan kebebasan. Selain itu, tokoh Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara memandang bahwa tujuan

²¹William A. Smith, *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, penerj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. xvii.

²²Rizky Very Fadli, "Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9: 2 (2020): 97.

²³Rijal Abdillah, "Analisis Teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 2:1 (2017): 1.

²⁴Paulo Freire, *Pendidikan Yang Membebaskan* (Jakarta: MELIBAS, 2001), hlm. 1.

²⁵Rijal Abdillah, *op. cit.*, hlm. 4.

pendidikan adalah memberi kesempatan atau kebebasan kepada peserta didik untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara optimal. Kesempatan ini meliputi hak peserta didik untuk berkreaitas sesuai bakat dan minat masing-masing, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang kreatif dan kritis.²⁶

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan bukan proses yang berlangsung secara kebetulan, melainkan ikhtiar sadar dan terencana untuk menciptakan iklim belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bebas mengembangkan potensi terbaiknya.²⁷ Merujuk pada definisi pendidikan di atas, maka makna pendidikan bukan kegiatan pasif melainkan upaya aktif menciptakan ruang kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi potensi dan kapasitasnya supaya menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Namun, dalam praktik dan kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan isi dan amanat undang-undang tertulis.

Masalahnya, perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia kerap kali disubordinasikan pada kepentingan politik praktis, bukan pada kebutuhan pedagogis yang sesungguhnya. Akibatnya, masyarakat merasakan penindasan struktural dan tenggelam dalam kebudayaan bisu. Tata kelola pendidikan di berbagai sekolah juga masih dikuasai oleh paradigma teknokratis yang terpaku pada ketaatan prosedural dan pemenuhan sasaran-sasaran yang bersifat terukur. Buktinya, para guru hanya absen kehadiran mengajar di kelas tanpa ada pemberian diri secara total mengajar di kelas. Singkatnya, hanya mementingkan penghasilan daripada pembelajaran di kelas.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika perubahan kurikulum di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pembaruan teknis, tetapi juga menyangkut orientasi ideologis dan relasi kuasa dalam pendidikan. Selain itu, pembahasan tentang kurikulum sangat urgen karena dipandang sebagai inti utama atau *formula vitae*

²⁶Siti Maisaroh dan Dya Qurotul A'yun, Pendidikan Dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara: Antara Kebebasan, Kemandirian, Kebudayaan, *Jurnal Media Akademik*, 2:12 Desember (2024): 5.

²⁷Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara No. 78 Tahun 2003.

²⁸Realita Meydena Andhela Totoda, dkk, "Analisis Kebijakan dan Peran Guru dalam Pergantian dan Pengembangan Kurikulum di Indonesia", *Jurnal Basicedu*, 7: 6 (2023) : 3.

dari keseluruhan proses pendidikan dasar dan menengah yang memuat arah, isi, serta tujuan pembelajaran yang dirancang secara sistematis.²⁹ Oleh sebab itu, dibutuhkan rekonstruksi kurikulum guna menunjang pendidik dan peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, penulis menggunakan gagasan pendidikan pembebasan Paulo Freire untuk mengkritik sekaligus merekonstruksi kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Dengan demikian, judul yang hendak diangkat penulis dalam karya ilmiah ini ialah: **Kritik dan Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Pembebasan Paulo Freire.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama kajian tulisan ini ialah: Bagaimana merekonstruksi kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dalam perspektif pendidikan pembebasan Paulo Freire? Hemat penulis, pertanyaan ini menjadi sangat urgen dan mendesak untuk mengatasi masalah kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia ini. Gagasan pendidikan pembebasan Paulo Freire menjadi rujukan utama untuk merkonstruksi kurikulum dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Selain permasalahan utama tersebut, adapun berbagai permasalahan turunan yang dijabarkan berdasarkan latar belakang di atas. *Pertama*, apa itu pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire? *Kedua*, bagaimana dinamika kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia? *Ketiga*, bagaimana merekonstruksi kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dalam perspektif pendidikan pembebasan Paulo Freire??

²⁹Null, J. W., *Curriculum: From Theory to Practice* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2011) hlm. 1.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Karya ilmiah ini dibuat sebagai persyaratan untuk mendapat gelar strata satu (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.3.2 Tujuan Khusus

Pertama, penulis menjelaskan bagaimana perspektif pendidikan pembebasan Paulo Freire. *Kedua*, penulis menjelaskan bagaimana dinamika kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. *Ketiga*, penulis hendak merekonstruksi kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dalam perspektif pendidikan pembebasan Paulo Freire.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penulis mengumpulkan sumber buku, jurnal, artikel, dan majalah sebagai referensi karya tulisan. Sementara itu, ada dua karya Paulo Freire, yakni *Education as the Practice of Freedom* dan *Pedagogy of the Oppressed* sebagai rujukan utama dalam membangun konstruksi gagasan dan argumentasi penulisan ini. Sumber-sumber pustaka yang lain digunakan penulis bertujuan untuk memperkuat tinjauan kritis pendidikan pembebasan Paulo Freire terhadap masalah kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia serta memperluas cakrawala berpikir para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, tulisan ini dijabarkan dalam lima bab.

Dalam bab I, penulis menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas landasan teoretis pemikiran pendidikan Paulo Freire sebagai kerangka analisis utama dalam tulisan ini. Uraian diawali dengan biografi intelektual Paulo Freire. Selanjutnya, bab ini mengkaji latar belakang pemikiran

Freire yang berakar pada filsafat humanisme klasik. Selain itu, penulis menguraikan dua karya utama Freire yang relevan untuk tulisan ini, yakni *Education as the Practice of Freedom* dan *Pedagogy of the Oppressed*. Selanjutnya, dibahas pula konsep-konsep kunci dalam pendidikan pembebasan Paulo Freire, seperti pendidikan gaya bank sebagai bentuk penindasan, pendidikan hadap-masalah, dialog sebagai hakikat pendidikan yang membebaskan, tahapan kesadaran (*conscientização*), serta beberapa komponen penting untuk menunjang pendidikan yang membebaskan. Singkatnya, bab ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis persoalan pendidikan dalam bab selanjutnya.

Bab III membahas secara komprehensif dinamika perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia, dimulai dari konsepsi dan definisi kurikulum yang ditinjau secara etimologis, harafiah, dan yuridis. Selanjutnya, bab ini menguraikan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Kemudian, penulis membahas faktor-faktor penyebab perubahan kurikulum dan menelaah dampak perubahan kurikulum terhadap profesionalisme guru serta kualitas dan karakter peserta didik dalam konteks transformasi pendidikan nasional.

Bab IV menyajikan tinjauan kritis terhadap kurikulum pendidikan Indonesia. Dimulai dari analisis tanggapan terhadap perubahan kurikulum yang mencakup penolakan dan penerimaan. Kemudian, dilanjutkan dengan evaluasi perkembangan kurikulum dari era Orde Lama hingga Reformasi. Selanjutnya, dilakukan telaah kritis terhadap persoalan utama kurikulum, seperti sifat konvensional yang berkaitan dengan pemikiran Paulo Freire, dominasi kepentingan politik dan ekonomi, serta struktur yang hierarkis. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekonstruksi kurikulum yang berlandaskan pada pendekatan humanis, demokratis, dan pengembangan kesadaran kritis sebagai arah transformasi pendidikan.

Bab V memaparkan kesimpulan atas seluruh pembahasan yang dipaparkan, serta saran-saran sebagai proposal pemikiran guna mengatasi beberapa problematika perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia.